

Kebijakan Moneter dan Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020

Salsabila Sukma¹ Dwi Arni Syakila² Bunga Manja Avrilia³ Joni Hendra K³
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: salsabilasukma353178@gmail.com¹ dwiarniisyakilaa@gmail.com²
bungamanjaavrilia04@gmail.com³ joniqizel77@gmail.com⁴

Abstrak

Pada tahun 2020 pandemi COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia dan berdampak buruk perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang mengalami resesi ekonomi pada tahun 2020. Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam kebijakan moneter menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi di masa pandemi Covid 19. Pemerintah dan otoritas moneter telah berupaya melakukan berbagai reformasi kebijakan dan pengawasan terhadap sistem perbankan, dengan tujuan meningkatkan stabilitas lembaga-lembaga keuangan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam merespon dampak pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit perbankan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.

Kata Kunci: Kebijakan , Moneter, Pertumbuhan, Ekonomi

Abstract

In 2020 the COVID-19 pandemic has spread rapidly to all parts of the world and has had a negative impact on the world economy, including Indonesia which experienced an economic recession in 2020. Bank Indonesia has the authority in monetary policy to maintain the stability of the Indonesian economy. Therefore, various efforts have been made by the Indonesian government to maintain economic stability during the Covid 19 pandemic. The government and monetary authorities have attempted to carry out various policy reforms and supervision of the banking system, with the aim of increasing the stability of these financial institutions. One of the policies taken by the Indonesian government to respond to the impact of the COVID-19 pandemic is to restructure banking credit. Monetary policy is central bank policy in the form of controlling monetary amounts to achieve the desired development of economic activities.

Keywords: Policy, Monetary, Growth, Economy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh dunia karena adanya virus corona atau Coronavirus Disease-19 (Covid-19). Covid-19 merupakan jenis virus korona terbaru yang awalnya ditemukan di Wuhan, Cina. Penyebaran Covid-19 yang cukup mudah dan cepat serta dampak yang mengerikan bagi penderita dengan penyakit bawaan mengakibatkan virus ini tergolong berbahaya (World Health Organization, 2020). Pemerintah dari berbagai negara langsung menerapkan karantina, lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai reaksi tindakan preventif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown antara lain Cina, Prancis, India, Indonesia, Italia, Malaysia, Filipina, Singapura, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia. Adanya pandemi Covid-19 menggerus perekonomian dunia sebesar USD 8,8 triliun atau 9,7%. Beberapa negara yang mengalami penurunan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) antara lain

Amerika Serikat (-0,3%), Singapura (-2,2%), Jerman (-2,3%), dan Cina (-6,8%). Aktivitas perekonomian di Indonesia pun tidak luput dari perlambatan akibat pandemi ini, dimana realisasi pendapatan negara hanya mencapai 31,21% pada triwulan kedua 2020. Penerimaan pajak dari seluruh jenis mengalami pertumbuhan negatif. Di Indonesia sendiri, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi terganggu. Ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah pandemi, agar masalah ini cepat teratasi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pandemi ini adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini memang cukup tepat untuk mencegah penularan pandemi ini. Namun, hal tersebut mengakibatkan banyak pekerjaan menjadi terhalang atau terhambat, bahkan membuat banyak perusahaan berhenti beroperasi, karena kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha di sektor riil maupun sektor keuangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berupa Penurunan tarif PPh Badan, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 Impor, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Pengurangan angsuran PPh 25 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam mengendalikan besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro yang tercermin dalam stabilitas harga, membaiknya output riil, dan banyaknya lapangan kerja. Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong kegiatan ekonomi, sedangkan kebijakan kontraktif bersifat sebaliknya.

Ketika perekonomian mengalami resesi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter yang mengakomodasi fluktuasi perekonomian yang disebut dengan procyclical monetary policy atau accomodative monetary policy. Kebijakan tersebut dapat mengatasi adanya gejolak struktural (shock) atau fluktuasi siklus kegiatan ekonomi yang ada ketika resesi. Bauran kebijakan moneter-fiskal dapat digunakan untuk mendukung procyclical monetary policy mencapai tujuan kebijakan makro secara optimal. Untuk mencapai semua sasaran perkembangan ekonomi yang di inginkan secara bersama-sama terbilang cukup sulit karena sering kali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut bersifat kontradiktif yang pada akhirnya menyebabkan pencapaian stabilitas ekonomi makro tidak optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran ekonomi makro yang optimal dengan memilih salah satu sasaran dengan mengabaikan sasaran lainnya atau pilihan lainnya adalah dengan memilih semua sasaran tetapi tidak ada satu pun yang dicapai secara optimal. Oleh karena itu, beberapa negara telah menerapkan kebijakan moneter yang lebih mengutamakan pada sasaran tunggal, yaitu stabilitas harga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Moneter dan Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun ke lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini.

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang dapat disesuaikan dengan siklus kegiatan ekonomi, kebijakan moneter mencakup semua upaya atau tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi variabel-variabel moneter dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit, dan nilai tukar mata uang. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan ekonomi makro yang bertujuan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam perekonomian.¹ Menurut Bank Indonesia (2017), kebijakan moneter adalah bentuk pengendalian besaran moneter, yang dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, serta pengendalian suku bunga. Tujuannya adalah mencapai stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, penurunan pengangguran, dan inflasi yang rendah atau stabilitas harga. Menurut Nopirin kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mengendalikan atau mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit di dalam perekonomian. Bank sentral bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan moneter di sebuah negara. Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter dalam perekonomian.² Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, tujuan kebijakan moneter adalah membantu mencapai sasaran makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran ini merupakan tujuan akhir dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter di Indonesia dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan moneter, sehingga bank Indonesia sering disebut pula sebagai otoritas moneter.

Di sisi lain, kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral melalui pengaturan uang beredar, kredit, suku bunga, dan pengeluaran dalam perekonomian juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga keseimbangan moneter, kestabilan nilai uang, serta membuka ruang produksi dan pembangunan, kebijakan moneter mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan memberikan peluang kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter berhasil dalam pelaksanaannya. Pertama, tidak ada bank sentral yang benar-benar independen tanpa campur tangan pemerintah. Namun, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, seperti kebijakan fiskal. Kedua, pengendalian inflasi hanya salah satu sasaran Bank Sentral. Sasaran-sasaran lain kadang bertentangan dengan pengendalian inflasi, sehingga Bank Sentral seharusnya fokus pada pengendalian inflasi sebagai sasaran utama. Ketiga, Bank Sentral harus mampu memprediksi inflasi dengan akurat. Keempat, Bank Sentral harus dapat mengawasi instrumen-instrumen kebijakan moneter. Kelima, pelaksanaan target inflasi yang konsisten dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa jenis kebijakan moneter yang umum diterapkan oleh bank sentral untuk memengaruhi kondisi moneter dan ekonomi: kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, pengaturan persyaratan cadangan bank, kebijakan kredit selektif, forward guidance,

1 Natsir, M. Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. (Mitra Wacana Media, 2014), hal.26

2 Mishkin, FS, Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan (Edisi 8; Salemba empat, 2008).

investasi mata uang, dan kebijakan makro prudensial. Bank sentral dapat menggunakan kombinasi berbagai kebijakan moneter ini untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pemilihan dan penggunaan jenis kebijakan moneter bergantung pada kondisi perekonomian dan tantangan yang dihadapi negara pada waktu tertentu.³

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara agar dapat memberikan dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap kegiatan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter adalah strategi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian agar berdampak jangka pendek terhadap aktivitas perekonomian. Implementasi Legislatif dan eksekutif menerapkan kebijakan fiskal melalui pilihan anggaran dan undang-undang yang berdampak pada pajak dan pengeluaran pemerintah. Bank sentral menerapkan kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan stabilitas anggaran. Kebijakan Cadangan Wajib Jumlah cadangan yang harus dipertahankan bank dalam bentuk uang tunai atau surat berharga diatur oleh kebijakan moneter yang dikenal sebagai kebijakan cadangan wajib. Strategi ini mencoba untuk mengurangi likuiditas pasar dan menahan ekspansi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kebijakan Pembelian Sekuritas Kebijakan moneter yang dikenal sebagai kebijakan pembelian sekuritas mensyaratkan bank sentral membeli sekuritas dari bank atau entitas keuangan lainnya. Strategi ini mencoba untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong ekspansi ekonomi. Kebijakan Pertukaran Mata Uang Kebijakan nilai tukar adalah jenis kebijakan moneter yang mengontrol seberapa banyak mata uang suatu negara akan ditukar dengan negara lain⁴.

1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) Strategi untuk meningkatkan jumlah uang beredar dikenal sebagai kebijakan moneter ekspansif. Pendekatan ini diterapkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan permintaan masyarakat umum. Ketika terjadi resesi atau depresi dalam perekonomian, kebijakan ini diberlakukan. Kebijakan moneter yang longgar (atau mudah) ini terkadang disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Taktik berikut digunakan untuk mencapai kebijakan ini:
 - a. Politik diskonto (suku bunga lebih rendah),
 - b. Politik pasar terbuka (membeli sekuritas seperti saham dan obligasi),
 - c. Politik rasio kas (lebih sedikit uang tunai), dan
 - d. Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar).
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) Kebijakan yang menurunkan jumlah uang beredar dikenal sebagai kebijakan moneter kontraktif. Ketika ada inflasi dalam perekonomian, pendekatan ini diterapkan. Kebijakan uang ketat dan kebijakan moneter kontraktif adalah sinonim. Taktik berikut dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan ini:
 - a. Politik diskonto (meningkatkan suku bunga),
 - b. Politik pasar terbuka (menjual sekuritas),
 - c. Politik rasio kas (meningkatkan cadangan kas), dan
 - d. Politik kredit selektif (pengetatan pemberian kredit).⁵

3 A. Ika Fahriska, Realita Penerapan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia dan Permasalahannya, Edisi Juli-Desember 2023, Vol.15 Nomor 2, hal. 219

4 Rahma Dinda Nisa, Tantangan Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Negara-Negara Berpenghasilan Rendah : Tinjauan Literatur, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024), hal. 479

5 Teguh Santoso, Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perekonomian Indonesia : Aplikasi Model Fleming, Universitas Diponegoro, hal. 112

Resiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter akomodatif selain memberikan manfaat juga dapat menimbulkan risiko. Suku bunga rendah berpotensi memicu penarikan utang berlebihan oleh korporasi sehingga meningkatkan risiko pengembalian utang. Risiko makin besar apabila utang dilakukan dalam valuta asing dan terjadi kenaikan suku bunga. Suku bunga rendah juga tidak dapat meningkatkan investasi yang produktif karena masih rendahnya permintaan. Kondisi tersebut menimbulkan decoupling antara pasar keuangan dan sektor riil, serta berpotensi menyebabkan asset bubble. Kebijakan QE negara maju di satu sisi mendorong capital inflow ke emerging market dalam bentuk portofolio. Inflow ini dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar dan mendorong harga aset negara emerging. Namun di sisi lain, negara emerging juga rentan terhadap pembalikan arus modal saat terjadi shock, terutama apabila bank sentral negara maju mengurangi atau menghapus QE. Pengalaman historis menunjukkan terjadi taper tantrum pada Mei 2013 ketika the Fed mengumumkan rencana pengurangan QE, yang menyebabkan nilai tukar negara emerging terdepresiasi. Negara dengan current account deficit besar menjadi yang paling terpukul. Kondisi ini menunjukkan bahwa ke depan penarikan QE berpotensi menimbulkan isu likuiditas di emerging market.

Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi dunia triwulan I 2020 di banyak negara menurun tajam sejalan meluasnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi seperti di Tiongkok, Eropa, Jepang, Singapura, dan Filipina mengalami kontraksi di triwulan I 2020, sementara pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) turun dalam menjadi 0,3%. Perkembangan April 2020 menunjukkan risiko resesi ekonomi global tetap besar tercermin pada kontraksi berbagai indikator dini seperti kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. Perkembangan ini mengakibatkan volume perdagangan dunia terkontraksi dan diikuti penurunan harga komoditas dan harga minyak. Sejalan dengan proyeksi kontraksi ekonomi yang berlanjut sampai dengan triwulan III 2020, ekonomi global pada 2020 diprakirakan tumbuh negatif 2,2%. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan kembali meningkat menjadi 5,2%, didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan faktor base effect.⁶ Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global sempat meningkat pada Maret 2020 dipicu dampak meluasnya COVID-19. Setelah itu, berbagai respons kebijakan yang ditempuh di banyak negara berkontribusi meredakan ketidakpastian dan mendorong berkurangnya aliran modal keluar dari negara berkembang dan diikuti menurunnya tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 tercatat 2,97% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy). Namun demikian, ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia tetap baik tercermin dari defisit transaksi berjalan triwulan I 2020 yang menurun menjadi 1,4% PDB dari 2,8% PDB pada triwulan IV-2019 dan cadangan devisa yang tetap besar. Nilai tukar Rupiah, setelah mendapat tekanan pada Maret 2020, juga kembali menguat mulai April 2020 seiring meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan terjaganya kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, kendati potensi risiko meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 perlu terus diantisipasi.

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun pada 2020 sejalan dampak pandemi COVID-19. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan meningkat, didorong perbaikan ekonomi dunia dan dampak positif

6 Perry Warjiyo, dkk. Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020, Bank Sentral Republik Indonesia, (Laporan, 2020).

stimulus kebijakan yang ditempuh. Defisit transaksi berjalan diperkirakan menurun di bawah 2,0% PDB pada 2020. Inflasi tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasaran 3,0% \pm 1% pada 2020-2021 sejalan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Pandemi COVID-19 yang meluas dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 di banyak negara menurun tajam. Perkembangan April 2020 menunjukkan risiko resesi ekonomi global tetap besar tercermin pada kontraksi kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. Volume perdagangan dunia diperkirakan berkontraksi dan diikuti menurunnya harga komoditas. Dengan proyeksi kontraksi ekonomi berlanjut hingga triwulan III 2020, Bank Indonesia memprakirakan ekonomi global 2020 tumbuh negatif 2,2% dan kembali meningkat pada 2021 menjadi 5,2% didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan faktor base effect.

Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat tinggi pada Maret 2020 dan sempat memicu aliran modal keluar dari banyak negara, termasuk dari negara berkembang ke aset yang dianggap aman. Perkembangan selanjutnya menunjukkan ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda dan mendorong berkurangnya aliran modal keluar dari negara berkembang serta diikuti menurunnya tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang. Hingga 18 Mei 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 18.010. Penambahan angka new confirmed cases dan total kasus positif masih dalam lintasan yang meningkat dan diperkirakan belum mencapai titik puncaknya (Grafik 2.1). Secara nasional, angka kematian (fatality rate) akibat pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Secara spasial, pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia (Grafik 2.2), dengan penyebaran tertinggi terjadi di wilayah Jawa. Sebagai mitigasi penyebaran pandemi COVID-19, beberapa daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁷

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 melambat terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja ekspor jasa sejalan dengan penerapan berbagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di global dan domestik yang membatasi mobilitas masyarakat dan kemudian menurunkan aktivitas ekonomi. Sementara itu, kepanikan di pasar keuangan global yang sempat meningkat tinggi pada Maret 2020 memicu pembalikan arus modal asing dan menurunkan kinerja pasar keuangan. Perkembangan terkini sejak April 2020 menunjukkan ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda yang kemudian berdampak positif pada berkurangnya aliran modal keluar dan menopang ketahanan eksternal Indonesia. Aliran masuk modal asing yang kembali naik mendorong kembali menguatnya nilai tukar Rupiah. Stabilitas perekonomian juga tetap terjaga tercermin dari inflasi yang tetap rendah dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Penerapan kebijakan PSBB di berbagai wilayah untuk memitigasi pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan optimisme pelaku usaha. Data April 2020 menunjukkan pelemahan ekonomi berlanjut. Dengan dinamika tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan menurun dan pada 2021 kembali meningkat didorong perbaikan ekonomi dunia dan dampak positif stimulus kebijakan. Sementara itu, stabilitas ekonomi tetap terkendali ditopang inflasi yang diperkirakan tetap dalam kisaran sasaran sebesar 3,0 \pm 1% serta stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97% (yoy) pada triwulan I 2020, melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy). Penurunan ini terutama berasal dari melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi nonmakanan, dan investasi,

7 Ismail Dwi Cahyo, dkk. Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal of Multidiscipliner Inquiry in Science* (Jakarta : Universitas Indraprasta, 2024), Vol. 1, No.4, hal. 1829

dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, dan sub-sektor Transportasi. Sementara itu, kinerja komponen dan sektor yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 tetap baik, seperti tercermin pada konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga untuk makanan kesehatan dan pendidikan, serta sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya. Di sisi permintaan domestik, perlambatan konsumsi diprakirakan berlanjut terutama dipengaruhi penurunan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi berkontraksi terutama investasi bangunan seiring tertundanya sejumlah proyek properti maupun infrastruktur. Demikian pula, kontraksi ekspor dan impor berlanjut sejalan proyeksi kontraksi perekonomian global. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan ditopang sektor sekunder dan tersier. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat pada 2021 didorong ekonomi dunia yang membaik dan dampak positif stimulus kebijakan yang ditempuh. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat semakin efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi selama dan pasca pandemi COVID-19.

Kebijakan Moneter Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam prakteknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia⁸. Kebijakan moneter adalah strategi yang dilakukan oleh bank sentral masing-masing negara, jika di Indonesia (Bank Indonesia) untuk memelihara stabilitas mata uang rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat dan suku bunga bank. Kebijakan moneter juga memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, hal ini sesuai dengan yang tertuang di UU No. 3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009. Tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga dan menjaga kestabilan nilai rupiah yang salah satunya mengarah pada tingkat inflasi yang rendah dan stabil.⁹ Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong kegiatan ekonomi, sedangkan kebijakan kontraktif bersifat sebaliknya.¹⁰

Covid-19 merupakan jenis virus korona terbaru yang awalnya ditemukan di Wuhan, Cina. Penyakit ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyebaran Covid-19 yang cukup mudah dan cepat serta dampak yang mengerikan bagi penderita dengan penyakit bawaan mengakibatkan virus ini tergolong berbahaya.¹¹ Kebanyakan orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis. Orang yang sudah lanjut usia dan mereka memiliki kondisi medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, atau kanker lebih mungkin terserang penyakit serius. Siapa pun bisa tertular Covid-19 dan menjadi sakit parah atau meninggal pada usia berapa pun. Sedikitnya 23.851 orang tercatat positif mengidap virus

⁸ Warjiyo, Kebijakan Moneter di Indonesia (Vol.6), Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, 2017.

⁹ Anshar, M. Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19, 2022.

¹⁰ Rizal, F. Humidi, Dampak Mikro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. El-Barka : Journal of Islamic Economics and Business, 2, (2),300-328

¹¹ Bainus, Rahman, Pandemi Penyakit Menular (Covid 19), Hubungan Internasional, Journal of Internasional Studies, 4(2),2020, 111-123

corona di Indonesia. Dari 6.057 pasien yang berhasil sembuh, 1.473 di antaranya tidak dapat bertahan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka infeksi dan kematian virus corona tertinggi (Kementerian Kesehatan, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus corona dengan angka kematian sebesar 7,8%, salah satu yang tertinggi di dunia. Akibat dampak Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Hal ini dibuktikan dengan data (Badan Pusat Statistik, 2022) yang menunjukkan penurunan sebesar 5,32% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh berkurangnya konsumsi rumah tangga, dan penurunan jumlah investasi di berbagai sektor perekonomian.¹² Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang sigap dan prudent. Agar dampak pandemi pada sektor perekonomian tidak semakin memburuk, Pemerintah mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter. Pada bidang moneter, kebijakan-kebijakan yang diambil Bank Indonesia dan Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Makropudensial Akomodatif. Dalam studi yang dilakukan oleh Swiss BIS, kebijakan makropudensial diartikan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik. Kebijakan makropudensial merupakan kebijakan yang tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas seluruh sistem keuangan dengan pmbatasan peningkatan risiko sistematis. Kebijakan makropudensial ini baru diperbaharui pada tanggal 20 Agustus 2018, dengan perkiraan permintaan pembiayaan real estat akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bank Indonesia telah mengambil kebijakan makropudensial sejak awal, sebelum merebaknya infeksi virus corona di Indonesia, karena perekonomian global saat itu sedang kurang baik sehingga menyebabkan perlambatan perekonomian global (Karinet. al., 2022). Hal inilah yang menyebabkan Bank Indonesia mengambil langkah penerapan langkah makropudensial untuk mencegah krisis. Pada triwulan I taun 2020, sebelum pandemi Covid-19 melanda indonesia, bank Indonesia menerapkan kebijakan pelonggaran ketentuan loan to valueratio (LTV), rasio intermediasi makropudensial (RIM), serta penurunan nilai tukar rupiah GWM, dalam rangka memitigasi dampak Covid-19. Kebijakan ini dilakukan untuk memfasilitasi perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan perekonomian masyarakat. Kebijakan ini terus berjalan hingga triwulan ke-3 tahun 2020 dengan sedikit penambahan.
2. Kebijakan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah. Uang memiliki fungsi sebagai alat tukar yang bertujuan untuk mempercepat pertukaran barang dan jasa. Jika bursa dapat beroperasi dengan cepat, pertumbuhan produksi dan konsumsi akan meningkat sehingga semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Di indonesia pihak yang bertanggung jawab dalam peredaran uang adalah Bank Indonesia. Menurut UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 1999 pada pasal 7 dinyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan Rupiah, dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Jika supply uang terlalu tinggi terhadap nilai pertumbuhan sektor riil, maka akan terjadi inflasi.¹³ Sebaliknya, jika supply uang beredar rendah, maka sektor riil tidak dapat berjalan dengan cepat, sehingga terjadi perlambatan ekonomi (Astuti & Eddyono, 2021). Akibat ketidakpastian pasar keuangan global dan akibat dari penyebaran pandemi Covid-19, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah selama pandemi Covid-19 menghadapi beberapa tantangan yang dapat menyebabkan dampak global. Hal ini menyebabkan meningkatnya penghindaran risiko (risk-averse) perilaku di kalangan investor. Banyak uang yang beredar pada tahun 2020 yang cukup tinggi di banding tahun-

12 Veri Galih, Miftahul, Kebijakan Moneter Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal : of Economics and Social Sciences, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri, 2024), Vo. 3, No.1, hal. 46

13 Anita Latuheru, Pwngaruh Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ekoonmi dan Bisnis, (Jayapura , 2024), Vol. 12, No. 2, hal. 9

tahun sebelumnya, kenaikannya mencapai +-700 triliun. Fenomena ini bertepatan dengan penurunan BI rate yang dilakukan BI pada tahun 2019-2020.

3. Kebijakan Pembelian SBN dari Pasar Sekunder. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan Bank Indonesia merupakan langkah mengatasi penurunan likuiditas uang akibat pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan akomodatif. Bank Indonesia akan melanjutkan komitmen dalam mendanai APBN 2020 dengan membeli SBN di pasar perdana sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Bank Indonesia, 2020). Guna menjaga stabilitas likuiditas keuangan dengan baik, SBN Bank Indonesia akan mendorong penyaluran kredit kepada dunia usaha dan pemulihan perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pres SKB III bersama Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa tidak mengorbankan, at all cost, sustainabilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan BI, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan. Kebijakan pembelian SBN dari pasar sekunder ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan pertama pada 2020 dengan injeksi likuiditas yang mencapai Rp415,8 triliun. Likuiditas yang longgar dapat mempercepat pemulihan nasional. Kebijakan pembelian SBN ini merupakan sinergi yang sangat baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional. Ini terbukti dengan pembelian SBN sejak tahun 2020 hingga februari 2021 telah membuat likuiditas di Indonesia menjadi longgar.
4. Penurunan Suku Bunga Kebijakan (BI7DRR). BI Rate yang saat ini menjadi BI 7 day reverse repo rate (BI7DRR) yang telah diganti sejak 19 Agustus 2016 lalu, merupakan kerangka operasi moneter yang dilakukan oleh bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah. Nilai BI7DRR selalu di update oleh bank Indonesia setiap sebulan sekali. Penetapan nilai BI7DRR salah satunya mempertimbangkan harga barang dan jasa yang berlaku di masyarakat. Jika dirasa harga barang dan jasa secara agregat mengalami kenaikan (inflasi), maka BI7DRR akan dinaikkan. Kenaikan harga secara agregat ini dinilai akibat dari peredaran uang di masyarakat yang terlalu banyak dibanding dengan produksi barang dan jasa yang sedang berjalan. Sedangkan pada tahun 2020 Indonesia mengalami kesulitan dalam perekonomian, maka untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional BI7DRR diturunkan.¹⁴ Pada tahun 2021, Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 3,50% setelah sebelumnya ada dinilai 3,75%. Keputusan tersebut merupakan pertimbangan dari perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Selama tahun 2021 Bank Indonesia konsisten memberikan suku bunga BI-7Day-RR berada di 3,50%. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan perekonomian, karena likuiditas yang lebih rendah dan menurunnya nilai BI7DRR dapat berkontribusi untuk menurunkan suku bunga simpanan dan pinjaman modal kerja. Penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) juga berdampak pada penurunan suku bunga perbankan dan imbal hasil SBN. Sehingga tingkat inflasi yang diharapkan dapat tercapai dan gangguan perekonomian akibat pandemi Covid-19 akan segera teratasi dengan pemulihan ekonomi nasional.
5. Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Bersama Pemerintah. Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang ditujukan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan bagian dari program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir

¹⁴ Ervina, Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, (ponorogo, Institut Agama Islam, 2023), Vo. 2, No. 1, hal. 4

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Adapun program yang diberikan oleh pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) bersyarat untuk Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH merupakan program yang dibuat pemerintah sebagai usaha percepatan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non tunai yang dapat dibelanjakan bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Kemudian untuk masyarakat yang terdampak PHK akibat pandemi, pemerintah menyediakan Kartu Prakerja dan untuk mendukung siswa, pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah memperkuat kebijakan dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) serta optimalisasi dan percepatan penyaluran bantuan sosial.¹⁵ Dengan beberapa kebijakan moneter di atas, Bank Indonesia mampu mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan moneter ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penanganan masalah ekonomi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Sehingga terlihat jelas bahwa Bank Indonesia serius dalam menghadapi masalah perekonomian di masa pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewianawati, 2020 yang menyatakan bahwa kebijakan moneter justru berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penanganan Covid-19. Dan juga sejalan dengan penelitian Gading dan Steven, 2022 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia serius dalam menghadapi masalah perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2020

Peranan sektor perbankan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Bank bertindak sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada mereka dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Stabilitas bank merupakan hal yang krusial mengingat bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi bergantung pada sektor perbankan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan stabilitas bank merupakan hal yang harus diupayakan secara terus-menerus. Dalam kenyataannya, sistem perbankan sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam stabilitas. Krisis keuangan dan perbankan telah menjadi fenomena umum di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Krisis ini tidak hanya menjadi beban ekonomi bagi suatu negara, tetapi juga berpotensi mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan perhatian terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, di mana penurunan kinerja debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, penting untuk mengkaji efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, dengan mempertimbangkan dinamika sektor perbankan. Untuk menangani krisis yang mungkin akan terus berlanjut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19.¹⁶

15 Jeffrey Sebayang, dkk. Respons Kebijakan Moneter Terhadap Pandemi Covid 19, (Medan, Universitas Sumatera Utara, fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021), Vol. 4, No. 2, hal. 153

16 Dewi Wuryandani, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2020, hal. 21

Interaksi Kebijakan Moneter di Tahun 2020 dengan Faktor-Faktor Lain

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Sentral, memilikir peran penting dalam mempengaruhi kondisi ekonomi makro suatu negara. Kebijakan moneter dapat berupa penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, maupun pengaturan jumlah uang beredar. Penerapan kebijakan moneter yang tepat dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi kebijakan moneter tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai faktor lain yang mempengaruhi efektivitas transmisi kebijaka Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kondisi perbankan menghadapi tekanan yang cukup berat dan moneter. Salah satu faktor penting adalah kondisi sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Stabilitas dan kinerja perbankan memiliki kaitan erat dengan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi variabel-variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Tantangan dan Isu Kebijakan Moneter Kebijakan moneter memainkan peran kunci dalam mengelola perekonomian suatu negara. Salah satu aspek penting dalam kebijakan moneter adalah bagaimana menangani kondisi krisis keuangan dan perbankan yang dapat berdampak luas terhadap kinerja ekonomi macroekonomi secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, stabilitas perbankan menjadi isu penting yang harus dijaga dan ditingkatkan, mengingat sektor perbankan berperan sentral sebagai lembaga intermediasi keuangan.¹⁷ Pemerintah dan otoritas moneter telah berupaya melakukan berbagai reformasi kebijakan dan pengawasan terhadap sistem perbankan, dengan tujuan meningkatkan stabilitas lembaga-lembaga keuangan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam merespon dampak pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit perbankan. Literature review ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui mekanisme suku bunga, nilai tukar, dan kredit. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi global, sinergi dengan kebijakan fiskal, dan respon sektor perbankan.

KESIMPULAN

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang dapat disesuaikan dengan siklus kegiatan ekonomi. , kebijakan moneter mencakup semua upaya atau tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi variabel-variabel moneter dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit, dan nilai tukar mata uang. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan ekonomi makro yang bertujuan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dunia triwulan I 2020 di banyak negara menurun tajam sejalan meluasnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi seperti di Tiongkok, Eropa, Jepang, Singapura, dan Filipina mengalami kontraksi di triwulan I 2020, sementara pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) turun dalam menjadi 0,3%. Perkembangan April 2020 menunjukkan risiko resesi ekonomi global tetap besar tercermin pada kontraksi berbagai indikator dini seperti kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Sentral, memilikir peran penting dalam mempengaruhi kondisi ekonomi makro suatu negara. Kebijakan moneter dapat berupa penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, maupun pengaturan jumlah uang beredar. Penerapan kebijakan moneter yang tepat dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi kebijakan moneter tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai faktor lain

17 Mas Agung, Kebijakan Penanganan Pandemi Covid 19, Edisi 2, 2020.

yang mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kondisi perbankan menghadapi tekanan yang cukup berat dan moneter.

Saran

Demikian artikel ini kami buat sebagai tugas mata kuliah sekaligus kami harap dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Kami sadar makalah ini jauh dari kata sempurna oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua guna memperbaiki makalah ini menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ika Fahrika, Realita Penerapan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia dan Permasalahannya, Edisi Juli-Desember 2023, Vol.15 Nomor 2
- Anita Latuheru, Pengaruh Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (Jayapura, 2024), Vol. 12, No. 2
- Anshar, M. Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19, 2022.
- Bainus, Rahman, Pandemi Penyakit Menular (Covid 19), Hubungan Internasional, Journal of Internasional Studies, 4(2),2020
- Dewi Wuryandani, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya, Jurnal Ekonomo dan Kebijakan Publik, 2022
- Ervina, Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, (Ponorogo, Institut Agama Islam, 2023), Vol. 2, No. 1
- Ismail Dwi Cahyo, dkk. Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Journal of Multidiscipliner Inquiry in Science (Jakarta : Universitas Indraprasta, 2024), Vol. 1, No.4
- Jeffrey Sebayang, dkk. Respons Kebijakan Moneter Terhadap Pandemi Covid 19, (Medan , Universitas Sumatera Utara, fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021), Vol. 4, No. 2
- Mas Agung, Kebijakan Penanganan Pandemi Covid 19, Edisi 2, 2020.
- Mishkin, F.S, Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan (Edisi 8; Salemba empat, 2008).
- Natsir, M. Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan . (Mitra Wacana Media, 2014)
- Perry Warjiyo, dkk. Laporan Kebijakan Moneter Triwulan 1 2020, Bank Sentral Republik Indonesia, (Laporan,2020).
- Rahma Dinda Nisa, Tantangan Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Negara-Negara Berpenghasilan Rendah : Tinjauan Literatur, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024)
- Rizal, F. Humidi, Dampak Mikro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia . El-Barka : Journal of Islamic Economics and Business , 2, (2)
- Teguh Santoso, Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perekonomian Indonesia : Aplikasi Model Fleming, Universitas Diponegoro
- Veri Galih, Miftahul, Kebijakan Moneter Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal : of Economics and Social Sciences, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri, 2024), Vol. 3, No.1
- Warjiyo, Kebijakan Moneter di Indonesia (Vol.6), Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, 2017.